



**News Title :** Jaga Ekosistem Perdagangan Aset Kripto, Bappebti Teken Kerja Sama dengan Jampidum Kejagung

**Media Name :** jakartadaily.id

**Journalist :** Sontry Napitupulu

**Publish Date :** 28 September 2024

**Tonality :** Positive

**News Page :**

**News Value :** 1,500,000

**Resources :** Kasan (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan), Olyv Andrianita (Sekretaris Bappebti)

**Ads Value :** 500,000

**Section/Rubrication :** Crypto

**Topic :** Tangani Pidana Aset Kripto

Crypto

### Jaga Ekosistem Perdagangan Aset Kripto, Bappebti Teken Kerja Sama dengan Jampidum Kejagung

Sontry Napitupulu - Sabtu, 28 September 2024 | 22:18 WIB



Penandatanganan perjanjian kerja sama ini melibatkan Kepala Bappebti, Kasan (kiri), dengan Jampidum Kejagung, Aspek Nana Mulyana (tengah) di Jakarta, Sabtu, 24 September. (Kementerian Perdagangan)

**JAKARTADAILY.ID** — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung (Jampidum Kejagung) untuk menjaga ekosistem perdagangan aset kripto. Hal ini juga bertujuan meningkatkan sinergitas dengan Kejagung.

Selain itu, PKS tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman penanganan barang bukti aset kripto dalam perkara tindak pidana umum.

Penandatanganan PKS ini dilakukan di Gedung Bappebti di atas gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Aspek Nana Mulyana di Hotel Gran Mahakam, Jakarta pada Selasa, 24 September. Turut hadir Wakil Ketua Jaksa Agung Iri Wibisono, Kepala Esaiskuff Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hassan Fawzi, jajaran Staf Atih Kejagung, jajaran Eselon II Kementerian Perdagangan, dan Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia (Aspakrima).

**Baca Juga:**  
**Kuatkan Sektor Aset Kripto Nasional, Bappebti Jajak Pelaku Usaha Kripto Memenuhi Standar Cointest Asia 2024**

"Penandatanganan PKS antara Bappebti dengan Jampidum Kejagung ini bertujuan menjaga ekosistem perdagangan aset kripto. Selain itu, penandatanganan PKS ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dengan Kejagung. Penandatanganan PKS tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman penanganan barang bukti dalam perkara tindak pidana umum terkait perdagangan aset kripto," ujar Kasan.

Kasan menjelaskan, ruang lingkup PKS ini mencakup dua poin besar. Pertama, penanganan barang bukti aset kripto dalam perkara tindak pidana umum. Jampidum dapat meminta dukungan ahli ahli forensik Bappebti dalam penanganan barang bukti berupa aset kripto pada tindak pidana umum. Saksi ahli akan membantu memastikan perpindahan barang bukti aset kripto telah diterima penuntut umum secara lengkap dan utuh apabila diperlukan.

"Kedua, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Bappebti dan Kejagung bekerja sama melalui berbagai kegiatan seminar, forum diskusi terpumpun, dan kegiatan lain yang relevan untuk meningkatkan kapasitas SDM," imbuh Kasan.

**Baca Juga:**  
**Cegah Terjadi Kerugian, Bappebti Minta Masyarakat Pahami Karakteristik Aset Kripto Agar Mendapat Gains**

Menurut Kasan, Bappebti telah menjalin berbagai sinergi dan kerja sama dengan Kejagung. Diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Menteri Perdagangan dengan Jaksa Agung tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada 2022. Sebagai tindak lanjut, Bappebti menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejagung Bidang Penulhan Aset untuk mengoptimalkan penulhan aset pada 2023.

Kasan menambahkan, Bappebti juga berkolaborasi dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jampidatun). Hal tersebut untuk pendampingan konsultasi hukum dalam mengembangkan tata kelola perdagangan aset kripto bersama ekosistem aset kripto.

"Bappebti menyampaikan apresiasi kepada Kejagung atas berbagai kerja sama yang telah terjalin baik sampai dengan saat ini. Hal ini diperlukan untuk pengembangan industri dan perlindungan perlindungan kepada masyarakat. Semoga kerja sama ini dapat terus ditingkatkan," terang Kasan.

**Baca Juga:**  
**Kejagung Jajak Kripto Diduga Digunakan dalam Tindak Pidana Berskala Besar di Indonesia**

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Aldison menyatakan, PKS ini merupakan salah satu terapan strategis Bappebti mengingat perdagangan aset kripto semakin marak di Indonesia. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan munculnya potensi aduan yang mengarah pada tindak pidana umum. Untuk itu, langkah ini ditempuh sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara tindak pidana terkait perdagangan aset kripto, khususnya dalam penanganan barang bukti.

Sekretaris Bappebti Olyv Andrianita mengutarakan, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Bappebti untuk pengembangan perdagangan aset kripto di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat sebagai pelanggan dan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri.